

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka penelitian ini berkesimpulan bahwa :

1. Setelah membenah dan menganalisis data program-program kemiskinan di dinas sosial melalui renstra, ada 4 program kemiskinan di dinas sosial yaitu Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Dari ke 4 program tersebut Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya dan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) memiliki penganggaran yang sangat bagus dari pada program program lainnya. Di Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dari keseluruhan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kemiskinan dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata 72,60% anggaran yang langsung ke masyarakat dan hanya 27,40% anggaran yang tidak langsung ke masyarakat, dan untuk PMKS lainnya dan Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dari keseluruhan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kemiskinan dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata

70,84% anggaran yang langsung kemasyarakatan dan hanya 29,16% anggaran yang tidak langsung kemasyarakatan, Sementara Program lainnya yaitu Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki rata-rata anggaran yang tidak langsung kemasyarakatan lebih besar dari pada rata-rata anggaran yang langsung kemasyarakatan. Untuk Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial memiliki rata-rata anggaran kemiskinan dari tahun 2016-2020 yaitu 46,82% untuk anggaran yang langsung kemasyarakatan dan 53,18 untuk anggaran yang tidak langsung ke masyarakat dan untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki rata-rata anggaran kemiskinan dari tahun 2016-2020 yaitu 2,38% anggaran yang langsung kemasyarakatan dan 97,62% yang tidak langsung kemasyarakatan

2. Di dinas pertanian memiliki 6 program untuk kemiskinan yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Dari ke 6 program tersebut ada 4 program yang memiliki penganggaran yang baik yaitu, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, program peningkatan ketahanan pangan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, dan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Di Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani dari keseluruhan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kemiskinan dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata 53,68% untuk anggaran yang langsung ke masyarakat dan 46,32% untuk anggaran yang tidak langsung ke masyarakat. Untuk program peningkatan ketahanan pangan memiliki rata-rata 69,34% anggaran yang langsung ke masyarakat dan 30,66% anggaran yang tidak langsung ke masyarakat, di Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan memiliki rata-rata 100% anggaran yang langsung ke masyarakat, dan untuk program peningkatan produksi pertanian/perkebunan juga memiliki rata-rata 100% untuk anggaran yang langsung ke masyarakat. Sementara untuk kedua program lain yaitu Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan memiliki rata-rata anggaran yang tidak langsung ke masyarakat lebih besar dari pada rata-rata anggaran yang langsung ke masyarakat. Pada program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan memiliki rata-rata anggaran kemiskinan dari tahun 2016-2020 yaitu 100% untuk anggaran yang tidak langsung ke masyarakat dan untuk program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan memiliki rata-rata hanya 2,34 % untuk anggaran yang langsung ke masyarakat sedangkan 97,66% anggaran yang tidak langsung ke masyarakat.

3. Setelah mengetahui fakta di atas bias terlihat bahwa di Dinas Pertanian mempunyai anggaran yang lebih baik dari pada dinas sosial, dimana

dalam dinas pertanian banyak program-program yang anggaranya langsung dinikmati atau langsung ke masyarakat dibandingkan dengan yang ada di Dinas Sosial.

### **5.1 Saran**

Adapun beberapa rekomendasi saran terkait hasil analisis diatas penulis merekomendasikan saran sebagai bereikut :

1. Terkait kebijakan anggaran kemiskinan pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan anggaran anggaran untuk kemiskinan agar penganggaran di setiap aspek aspek dapat berjalan dengan baik dan merata.
2. Perencanaan program harus dipastikan untuk dapat ditingkatkan sehingga tidak hanya layak tetapi juga memberikan manfaat pada saat dibutuhkan.
3. Mengevaluasi program agar nantinya penganggaran lebih kena langsung kemsyarakat.
4. Upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam memantau dan evalusai yang lebih baik juga dapat mengidentifakasi kemiskinan dalam perancangan program program.
5. Memperhatikan anggaran pemerintah yang sering mengendap disatu aspek agar semua aloaksi berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi*, 481-497.
- Anwar, M. L. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, (Vol 2) , 42-45
- Astuti, W. (2015). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). *EBBANK*, (Vol 1), 1-18.
- Badan Pusat Statistik Gorontalo. *Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gorontalo, 2011 – 2018*.
- Badan Pusat Statistik Gorontalo. *Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota diprovinsi Gorontalo, 2014-2018*.
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*.
- Febriana, E. (2010). Strategi untuk peningkatan pendapatan rumah tangga petani miskin di pedesaan: studi kasus pada rumah tangga petani miskin di desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. (Vol 4), 1-5
- Hermawan, I. (2012). Analisis eksistensi sektor pertanian terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (Vol 2), 135-144.
- [\(17/11/2019\)](https://gorontalo.bps.go.id/dynamictable/2018/01/12/236/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-gorontalo-2014-2018.html).
- [\(14/11/2019\)](https://gorontalokab.bps.go.id/statictable/2019/08/16/310/-garis-kemiskinan-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-gorontalo-2011-2018.html).
- [\(14/11/2019\)](https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html).
-

- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of Capital Expenditures, Development Index and Unemployment on Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, (Vol 1). 23-26
- Paseki, M., Naukoko, A., & Wauran, P. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, (Vol 3), 30-35
- Sa'dah, Lailatus, & Maksimum, M.F.J.S “ Ballanced scorecard”, CV Budi Utama, Jombang, 2018. (Vol 21), 19-23
- Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (Vol 2), 147-161.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, (Vol 2), 211-228.
- Slide share. Mata kuliah akuntansi pemerintah dengan tema anggaran pemerintah. <https://www.slideshare.net/palmarenia/mata-kuliah-akuntansi-pemerintah-dengan-tema-anggaran-pemerintah>. (09/01/2020).
- Studio belajar. APBN&APBD.
- Subandi, (2016) *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*, (Vol 4), 21-27.
- Tiza, A. (2014). Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) di Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). (Vol 5), 22-27
- Widianto, A., Sedyautami, E. U., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, (Vol 2), 31-33